

KAPITAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN DESA: KRITIK TERHADAP PROGRAM *TRADE AND DISTRIBUTION CENTER* (BUMDES) DI WILAYAH LOMBOK BARAT-PROVINSI NTB

SOCIAL CAPITAL IN VILLAGE DEVELOPMENT: CRITIQUES ON THE TRADE AND DISTRIBUTION CENTER (TDC) PROGRAM OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISE (BUMDES) IN WEST LOMBOK, WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

Alfian Hidayat, Syaiful Anam, Zulkarnain

Kelompok Peneliti Bidang Kajian Pembangunan dan Migrasi Internasional,
Prodi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Mataram-NTB
alfian.hidayat@unram.ac.id

disubmit: 28 Desember 2022, direvisi: 22 Maret 2023, diterima: 12 Juni 2022

ABSTRAK

Agenda pembangunan yang terkait peningkatan kesejahteraan kerap mengalami kegagalan. Pembangunan dan model kebijakan yang sangat elites serta mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal menjadi salah satu akar penyebab kegagalan tersebut. Studi ini bertujuan untuk menelaah bagaimana program pembangunan mengintegrasikan nilai-nilai luhur atau kapital sosial yang ada sebagai *Engine of Development*. Dalam konteks pembangunan desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk mencapai visi yang tertuang dalam “*NTB Gemilang*” memiliki program *Trade and Distribution Center* desa yakni program distribusi dan pusat perdagangan di desa melalui skema bisnis Badan Usaha Milik Desa. Skema ini bertujuan untuk modernisasi dan digitilisasi desa dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat desa. Namun, dalam perkembangan studi mengenai Badan Usaha Milik Desa di Indonesia pada umumnya merupakan kebijakan yang kerap diselewengkan untuk kepentingan politik dan pembangunan yang sifatnya parsial dan jangka pendek. Studi ini mencoba menelaah dan memberikan kajian kritis terhadap hilangnya kapital sosial dalam implementasi program *Trade and Distribution Center* desa. Melalui pendekatan kualitatif eksploratif, studi ini berfokus pada *pilot project Trade and Distribution Center* di wilayah Lombok Barat NTB yang secara implisit telah menemukan jawaban bahwa kapital sosial tidak tereproduksi dalam agenda pembangunan dikarenakan pembangunan yang tergambar sangat politis dan elites baik dalam penyusunan maupun implementasinya.

Kata kunci : Badan Usaha Milik Desa, Kapital Sosial, Pembangunan Desa, NTB Gemilang, *Trade and Distribution Center*.

ABSTRACT

Development agendas related to improving welfare in developing countries often face failure. In post-authoritarian Indonesia, the development and policy model patterns are still very elite, centralistic, and clientelist. It even often negates the value of local wisdom as one of the failure's root causes. This study examines how development programs integrate noble values or social capital as the Development Engine. In the context of village development in NTB, to achieve the vision contained in Governor's NTB Gemilang Program, the village (Trade and Distribution Center) TDC program is designed, namely the distribution program and Trade Center in the village through the Village-owned Enterprise (BUMDes-Badan Usaha Milik Desa) business scheme. This scheme aims to modernize and digitize the village by fulfilling the basic needs of the village population. This program also is expected to contribute to the village's domestic income (PADes). However, in the development of BUMDes in Indonesia, this policy model is often distorted for political and development interests that are partial and short-term. This study

examines and critically studies the loss of social capital in implementing the TDC program. Modernization and digitalization in the village development agenda, in general, have a good purpose. But it will also damage the values of village Wisdom when development removes an important aspect of existing social capital. Through an exploratory qualitative approach, this study focuses on the pilot project TDC in West Lombok NTB, which implicitly found that social capital is not reproduced in the development agenda because it is deemed as entirely political and elite both in the making and implementation.

Keywords: *Village Development, Social Capital, BUMDes, NTB Gemilang, Trade and Distribution Center.*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan garda depan pembangunan nasional dan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional yang sangat strategis, dan bahkan menjadi tulang punggung nasional (Kimbal, 2018). Hal ini merujuk pada masalah dan tantangan pembangunan di Indonesia sampai saat ini adalah masalah kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Dari ketiga masalah pembangunan tersebut jika diamati secara cermat justru banyak berada di pedesaan (Nain, 2019).

Dalam konteks pembangunan di Indonesia, perubahan model pembangunan desa tercermin pasca kejatuhan rezim otoriter orde baru. Sistem politik pembangunan Indonesia mengalami pergeseran transisi (Waris, 2012), dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, di tengah dinamika transisi berjalan, gelombang isu strategis tentang pentingnya desentralisasi politik pembangunan berbasis wilayah terus bermunculan, politik

pembangunan sentralistik pada waktu orde baru tidak dianggap relevan dan cenderung diskriminatif. Politik pembangunan desentralisasi merupakan antitesis politik pembangunan yang ingin meninggalkan gaya lama, isu tentang pentingnya politik pembangunan desentralisasi pada ranah lokal kemudian terus berkembang mengalami proses reorientasi sesuai arah dan tujuan dari reformasi.

Sesuai dengan semangat reformasi, bahwa politik pembangunan, sudah saatnya diserahkan ke daerah, sekaligus desa-desa yang menjadi bagian dari desentralisasi politik pembangunan, tujuannya Menurut Rondinelli, Nellis dan Cheema dalam Haryanto (2016) desentralisasi sering dibenarkan sebagai cara untuk mengelola pembangunan ekonomi nasional lebih efektif dan efisien. Tentunya ide pembangunan dan pengelolaan secara mandiri dalam rangka pembangunan desa yang lebih efektif dan efisien membutuhkan kapital sosial sebagai penunjang tujuan pembangunan (Fukuyama, 2002). Kapital sosial

masyarakat desa mampu memberikan spirit pembangunan yang lebih partisipatif dan inklusif. Hal ini juga yang menjadi prioritas utama gerakan *Saemaul Undong* di Korea berupa prinsip “*spirit of dilligence, self-help, dan cooperation*” yang basis utamanya adalah pemerintah Korea menyadarkan, menghilangkan kepasrahan, dan menanamkan rasa percaya diri pada penduduk desa (Lestari, 2016). Menurut Pambudi dalam (Kimbal, 2018), partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dapat memberikan wajah desa yang jauh lebih kreatif dan inovatif dalam mencapai tujuan pembangunan. Selama ini masyarakat desa justru menjadi korban pembangunan dan termarginalkan dalam agenda pembangunan.

Sebagai bagian dari masyarakat global, tujuan Pembangunan desa juga mengadopsi tujuan pembangunan global berkelanjutan. Pembangunan yang tidak hanya menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi dan sosial namun mengintegrasikan juga aspek lingkungan. Hal ini tertuang dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa yang menjadi landasan pembangunan di desa (Andari, 2021). Orientasi pembangunan yang hanya bertumpu pada kepentingan ekonomi terbukti menghasilkan pembangunan jangka pendek dan parsial. Ide pembangunan normatif ini tentunya masih belum tergambar dalam wajah

pembangunan di Indonesia, Ide pembangunan berorientasi pertumbuhan sangat yakin bahwa dengan terintegrasi dengan ekonomi global dan industrialisasi, negara-negara berkembang akan lebih mudah untuk memperoleh hasil baik dari proses pembangunan (Peet & Hartwick, 2015) . Institusi pembangunan diarahkan untuk mengukur kesuksesan sebuah pembangunan negara dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Agenda pembangunan kerap kali menjadi instrumen elite untuk mendukung kontestasi politik seperti pilkada dan pilpres. Kepentingan para elit dalam rumusan kebijakan desa lebih menjadi prioritas dari pada kepentingan masyarakat (Amin, 2017). Agenda pembangunan menjadi etalase politik para elit/incumbent yang akan maju kembali pada pemilahan kepada daerah. Data Indonesian corruption watch (kompas, 2019) menunjukkan terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar. Pada konteks pembangunan desa di NTB, data BPS menunjukkan Indeks pembangunan desa di wilayah NTB telah berada pada rata-rata nasional. Rata-rata Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 66,63,

di atas rata-rata Indeks Pembangunan Desa secara nasional.

Visi Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkiflimansyah menjadikan “NTB Gemilang” terlihat dari beberapa terobosan pembangunan yang sedang berjalan. Sinkronisasi tujuan pembangunan terhadap SDGs desa menjadi bagian penting. Dalam rangka merevitalisasi berbagai potensi perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintah Provinsi NTB membuat terobosan baru melalui program-program unggulan. Revitalisasi yang gencar dilakukan pemerintah NTB adalah infrastruktur ekonomi digital yang terintegrasi yang dimulai dari tingkat desa. Program digitalisasi ini telah dimulai dengan mulai berdirinya BUMDes yang bergerak pada pusat distribusi dan perdagangan di beberapa desa di wilayah Lombok Barat. Salah satu program andalan adalah *Trade and Distribution Center* (TDC) desa. TDC merupakan program Suplai dan distribusi logistik melalui model digitalisasi.

Tujuan pembangunan ini memiliki tantangan yang besar khususnya dalam implementasi skema bisnis di tingkat desa. Secara kultural, program TDC Mahadesa yang diimplimentasikan melalui PT Mahadesa akan menjadi arus balik bagi sosio kultural, karena pembangunan berbasis digitalisasi ini sesungguhnya mencerabut akar sosiologis melalui

kesenjangan digital di masyarakat desa dan meninggalkan kearifan lokal, seperti gotong royong dan kultural masyarakat adat desa (Nasution, 2016). Tantangan terbesar dari dari program TDC BUMDes Ini adalah hilangnya kapital sosial, menurut Kesuma & Saputri (2020) dan Kafabih (2018) bahwa kapital sosial justru memainkan peran penting dalam pengembangan skema bisnis BUMDes dan skema bisnis di desa. Pembangunan yang bercorak ekonomi oriented tentunya akan mengikis relasi sosial dan stuktur nilai diantara masyarakat desa. Pesona masyarakat desa akan hilang (Nain, 2019), modernisasi akan menghilangkan nilai sosio kultural masyarakat desa, masyarakat desa lambat laun akan terkikis oleh akibat jalinan capital, relasi sosial berbasis kapital akan menggantikan sosiokultural yang ada. Tumbuh pesatnya pasar-pasar modern di desa adalah salah satu contoh bagaimana desa mengalami proses pemiskinan secara struktural tersebut. Serbuan kapitalisasi gaya baru, seperti model TDC desa dapat mengancam akar sosiologi pembangunan yang mengutamakan gotong royong dan partisipatori.

TDC desa sebagai bagian dari program “NTB Gemilang” akan mendapat tantatng terhadap ketercapaian dan kesuksesan program ini. Sehingga menarik untuk mengkaji bagaimana tantangan

program implementasi TDC desa di wilayah Lombok Barat.

Peter Evans, memberikan tesis mengenai hubungan kapital sosial terhadap kesuksesan pembangunan. Menurut Evans dalam Mohapatra & Evans (1998) gambaran terhadap pembangunan DAM desa dalam kasus di Tiongkok menggambarkan bahwa reproduksi kapital sosial menjadi modal utama dalam ketercapaian tujuan pembangunan yang diinisiasi oleh negara dengan mereproduksi kapital sosial yang ada. Studi ini menggambarkan secara kritis mengenai kajian kapital sosial yang tidak termanifestasi kedalam program pembangunan TDC desa di wilayah Kabupaten Lombok Barat NTB.

METODE PENELITIAN

Dalam menjawab rumusan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data yang menekankan pada wawancara terhadap informan yang berkorelasi langsung dengan pemangku kebijakan yakni pemerintah desa, PT Mahadesa selaku provider dan operator skema bisnis, BUMDes selaku eksekutor bisnis di tingkat desa serta komponen dari masyarakat baik dari tokoh masyarakat maupun badan permusyawaratan desa. Studi ini dilakukan di tiga desa di wilayah Lombok Barat yakni desa Dasan

Baru, Selat dan Duman. Pemilihan informan dari ketiga desa ini merupakan hasil dari purposive sampling dari berbagai saran dan rekomendasi dari pihak pemerintah dan PT Mahadesa. Studi ini juga menggunakan triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan sumber dan berbagai jenis data yang telah didapatkan, khususnya dalam studi ini menggunakan data sekunder dari beragam sumber dan artikel ilmiah guna mengeliminasi bias analisis dalam kajian ini.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *Social Capital* atau kapital sosial menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), yang diartikan sebagai jaringan bersama dan pemahaman bersama terkait Norma dan nilai, yang memfasilitasi kerjasama di dalam atau di antara kelompok. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa kapital sosial sebagai hubungan yang kuat antara kelompok atau individu. Hubungan/jaringan ini seperti jaringan, nilai dan norma merupakan penopang penting dalam setiap sosial kelompok. Konsep kapital sosial menjadi salah satu komponen penting untuk menunjang model pembangunan manusia karena dalam model ini, manusia ditempatkan sebagai subjek

penting yang menentukan arah penyelenggaraan pembangunan.

Menurut Tsai dan Ghosal (1998) mengatakan bahwa kapital sosial adalah sebagai konsep yang didasari kepercayaan, obligasi, dan identifikasi yang dibawa didalam hubungan personal antar individu, masyarakat maupun organisasi yang mana hal ini merupakan bagian dari dimensi relasional dari konsep kapital sosial oleh keduanya (Tsai & Ghoshal, 1998). Sedangkan menurut *The World Bank* dalam Cohen dan Prusak (2001) mendefinisikan kapital sosial sebagai: Norma dan hubungan sosial dalam struktur sosial yang dapat membuat orang untuk melakukan suatu aksi terkoordinasi untuk mencapai sebuah tujuan.

Sebagai salah satu modal utama pembangunan, kapital sosial berupa nilai, norma, serta aspek partisipasi memiliki posisi penting dalam akselerasi pembangunan. Sehingga argument yang dibangun dalam studi ini hendak memberikan penekanan bahwa pembangunan yang menihilkan modal sosial akan melahirkan pembangunan yang terkesa elites dan berakhir pada kegagalan dalam mensejahterakan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hilangnya kapital sosial dalam komponen pembangunan desa di wilayah

NTB melalui skema bisnis TDC yang dikaji dalam beberapa hal; pertama, skema bisnis TDC merupakan bagian dari politisasi pembangunan desa berupa eksklusifitas elites baik dari tingkat desa sampai pada tingkat pemerintah daerah. Kedua TDC dan BUMDes yang digerakkan melalui operator PT Mahadesa di wilayah Lombok Barat tidak mampu mengintegrasikan nilai-nilai luhur atau kapital sosial desa yang ada kedalam skema implentasi bisnis di akar rumput. Ketiga peran negara berupa *political will* dan aspek keberpihakan dalam mendukung reproduksi kapital sosial tidak terjalin dengan baik dikarenakan orientasi pemerintah desa yang masih parsial dan politis dalam menanggapi skema bisnis TDC.

TDC BUMDes: Politisasi Pembangunan Desa dan agenda Elite

Kritisisme pembangunan desa adalah bagian dari memberikan jawaban mengenai beragamnya agenda pengentasan kemiskinan yang justru mengalami kegagalan pada tingkat desa. Pembangunan justru memperlebar jurang kesenjangan antar kota dan desa dikarenakan pembangunan desa kerap mengalami politisasi dari kepentingan elite pusat dan elite lokal di daerah (Saputro, 2020). Artikel ini hendak memperlihatkan salah satu dari dimensi pemusatan

kekayaan dan kekuasaan yang terjadi dalam kajian kritikal ekonomi politik.

Pada konteks Indonesia, Reformasi melahirkan tatanan baru dalam model dan pola pembangunan. Desentralisasi merupakan sebuah konsep politik pembangunan yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri (Hisyam, 2015). Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta keterjangkauan agenda pembangunan di daerah. Desentralisasi pembangunan dimaksudkan sebagai politik pembangunan otonomi daerah yang menekankan pada hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan (Pratikno, 2020).

Penyelenggaraan desentralisasi sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah umumnya menganggap bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang ada saat ini melalui UU No. 32 tahun 2004, merupakan sebuah kebijakan

yang sangat reformatif bagi daerah dalam rangka pengembangan potensi daerah, dikarenakan; *Pertama*, bahwa secara politis kebijakan tersebut akan memberikan keleluasaan pada Pemerintah Daerah untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. *Kedua*, secara ekonomis Pemerintah Daerah akan diuntungkan karena mempunyai wewenang yang lebih besar untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayahnya (Kaho, 1997).

Posisi strategis yang dimiliki oleh pemerintah Desa di era desentralisasi tidak diikuti oleh kewenangan yang besar. Jika dilihat dari politik pembangunan desa yang dirancang oleh Gubernur NTB, secara sosio-kultural, program TDC Mahadesa hakikatnya akan memudahkan desa, namun pasti juga akan menjadi arus balik bagi sosio kultural, karena pembangunan berbasis digitalisasi ini akan mencerabut akar sosiologis, yaitu sifat keutuhan dan nilai gotong royong dan kearifan lokal (Saleh, 2021).

Politisasi pembangunan dalam kerangka kritisisme pembangun desa juga terwujud dalam kerangka ikatan yang diciptakan oleh struktur hubungan asimetri perturan barang masyarakat perkotaan dan pedesaan, suplai pangan yang murah

untuk penduduk kota dan barang penunjang yang menghasilkan pangan tetap ditanggung sendiri oleh petani atau masyarakat desa. Model hubungan yang konfliktual ini juga memberikan isyarat pembangunan pedesaan tidak lepas dari motif politik.

Atas nama daya saing pihak yang paling dirugikan justru adalah masyarakat desa, yang miskin dan tidak memiliki akses terhadap kegiatan pembangunan. Agenda pembangunan ekonomi dan digitilisasi yang seperti ada di NTB dengan sekma TDC desa pada prinsipnya dimaknai sebagai ekspansi teknologi dan komersialisasi yang memainkan peran dalam proses ini.

Komersialisasi telah menyebabkan produk perkotaan membanjiri desa-desa dari perabot rumah sampai pada kebutuhan sehari-hari, yang pada akhirnya mematikan beberapa komoditas desa yang cenderung tidak mampu berdaya asing dalam kuantitas dan efisiensi (Chambers, 1987). Kondisi ini juga pada akhirnya mematikan peran pengrajin di desa, budaya konsumtif dan hedonisme mulai muncul disela-sela kearif lokal desa yang mulai hilang (Diah, 2020). Konsekuensinya adalah proses gotong royong dan tradisi komunalisme terganti dengan posisi kelas majikan dan buruh serta pekerja dan si pemberi kerja. Hubungan sosial desa yang khas tergantikan dengan hubungan timbal balik yang terpusat pada

nilai ekonomi semata. Pembangunan yang partisipatif sebagai semangat reformasi justru belum tergambar dalam pembangunan pada tingkat desa.

Pembangunan yang partisipatif akan mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (Sugianto & Permady, 2020). Menurut Gutama & Widiyahseno (2020) Inklusifitas pembangunan itu tecermin dari terintegrasinya aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dan keterlibatan semua pihak dalam perumusan agenda pembangunan. namun hal ini justru sebaliknya yang terjadi, eksklusifitas pembangunan pedesaan dengan kemandirian melalui dana alokasi desa justru menjadi peluang munculnya pembangunan yang elitis dan politis. Anggaran dana desa (ADD) kerap dipolitisasi dengan ketakutan akan sejumlah pertanggung jawaban berupa pengaturan serta teknikalisis dengan kondisi ketidakmampuan pemerintah desa yang secara mandiri dalam merumuskan penggunaan ADD secara strategis. Studi (Abidin, 2015) memberikan gambaran sejumlah permasalahan ADD dalam perencanaan, pelaksanaan, kualitas pelaporan, dan lemahnya kelembagaan desa serta koordinasi dengan pemerintah daerah kotamadya/kabupaten.

Beberapa bentuk politisasi agenda pembangunan skema bisnis tampak dari beberapa hal; *pertama*, aksesibilitas politik

atau keterkaitan motif politik antara pihak pemerintah desa dengan pemerintah provinsi dapat terlihat dari bantuan pemerintah terhadap keikutsertaan desa dalam sekma bisnis TDC. Wawancara mendalam dengan AS (salah satu direktur BUMDes di wilayah Lombok Barat) menuturkan bahwa ketika desa menyetujui untuk mengikuti agenda dari pemerintah provinsi maka kemungkinan bagi desa untuk mendapatkan atau mengakses program-program pemerintah berikutnya semakin besar. *Kedua*, Bantuan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema BUMDes, di mana PT. Mahadesa bekerjasama dengan bank BNI menggunakan identitas masyarakat untuk mengeluarkan dana KUR yang digunakan untuk pengembangan TDC. Wawancara mendalam dengan beberpaa SPV (sales) yang merasakan adanya sisi emosional, berupa ketidakjelasan mekanisme dalam insetif dan realiasasis KUR. Ada indikasi masyarakat dalam hal ini SPV dijadikan instrumen oleh pihak PT Mahadesa dalam model penambahan modal skema bisnis ini. *Ketiga*, Insentififikasi bagi pemerintah desa dalam mendukung program TDC, Pemerintah desa dijanjikan dana dari pihak provinsi jika mereka bersedia membangun TDC di desanya tapi dalam implementasinya, dana tersebut tidak ada. Dari informan Suhardi (salah satu kepala desa di wilayah Lombok Barat)

menerangkan bahwa janji politis dari pemprov belum ada realisasi, dalam hal ini modal hanya bersumber dari pemerintah desa sebagai investor pasif tunggal yang mengalokasikan dana sebesar 140-150 juta dalam pengembangan skema bisnis ini.

BUMDes: Program TDC Desa dan Modal sosial

Bangsa yang memiliki kapital sosial yang tinggi akan cenderung lebih efisien dan efektif menjalankan kebijakan untuk memajukan kehidupan rakyatnya (Putnam, 1995). Kapital sosial yang tinggi memiliki pengaruh yang sangat tinggi dalam kemajuan berbagai sektor ekonomi. Warna desa yang individualistik mulai tergambar dalam kehidupan dewasa ini, kekompakan menurun drastis memperlihatkan hilangnya kohesifitas sosial di pedesaan. Gotong royong dan tolong menolong yang akhirnya bermuara pada hilangnya *reciprocity dan trust* dan menipisnya sosial networking di desa. Sehingga (Fukuyama, 2002) dan De Soto dalam (Hall, 2004) menyimpulkan-kegagalan pembangunan di negara dunia ketiga terkait erat dengan akar kebudayaannya.

Realitas pembangunan saat ini memang kerap mengesampingkan dimensi kultural (Hasbullah, 2006) diambil alih oleh kepentingan ekonomi dan politik sebagai sandaran utama pembangunan. Hilangnya pemaknaan kultur dan kapital sosial

pembangunan di Indonesia pada umumnya telah terjadi bahkan pada periode kolonialisasi. Pendekatan yang struktural telah banyak dikelurakan oleh pemerintah dalam agenda pembangunan. Dana yang dikeluarkan sangat besar namun agenda pengentasan kemiskinan dan kesenjangan serta pemerataan pembangunan lebih banyak mengalami stagnasi dan bahkan kegagalan dalam beberapa periodisasi (Hasbullah, 2006). Kurangnya kapital sosial merupakan argumen yang dibangun oleh Hasbullah untuk melihat kegagalan tersebut;

Pertama, budaya kemiskinan dan kapitalisme pedesaan yang berbenturan kerap terjadi di masyarakat lapisan bawah menjadi determinisme agenda pembangunan mengalami kegagalan (Adawiyah, 2018). Hal ini juga menjadi konsep bagaimana kapitalisasi pedesaan terwujud dalam program TDC desa yang berjalan masing-masing dan saling mengeksklusi satu sama lain (Fathy, 2019). Dan bahkan masyarakat dengan kohesifitas yang tinggi dengan eksternalsitas (*bonding groups*) yang rendah menjadikan adanya ekspansi ide dan pemikiran yang justru datang dari luar entitas kultur lokal (Adawiyah, 2018). Entitas kapital sosial yang muncul justru bukan dari entitas lokal namun bersinggungan dan sisi eksternalitas yang belum tentu searah dan sejalan dengan kultur masyarakat tersebut.

Pada aspek kelembagaan, sebuah entitas kelembagaan tidak berjalan dengan kuat dan efektif salah satunya dikarenakan hilangnya *trust* yang harusnya tumbuh dalam masyarakat sebagai respon positif agenda pembangunan. Bahkan sebaliknya yang muncul adalah *low trust* dalam kondisi sosial tertentu yang mengisyaratkan ketidakpercayaan kepada aparatur desa. dengan Kesenjangan dan ini diperburuk dengan sisi emosional masyarakat yang pada akhirnya memberikan konsekuensi hilangnya kapital sosial atau tidak berkembangnya kapital sosial tersebut.

Berdasarkan kajian teoritis mengenai perekonomian desa, terdapat hal yang menarik di dalamnya, bahwa desa memiliki kondisi kapital sosial masyarakat yang sangat kuat dan telah mengakar. Salah satu bentuk kapital sosial yang dimaksud oleh Field dalam (Fathy, 2019) dapat digambarkan melalui beragamnya ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat dimiliki masyarakat desa sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Namun kondisi kapital sosial yang dimiliki masyarakat desa masih berbanding terbalik dengan kondisi modal ekonomi desa, dimana kapital sosial masyarakat desa yang terdiri dari ikatan sosial (*social bonding*), jembatan sosial (*social bridging*) dan jaringan sosial (*social linking*), yang ketiga ikatan sosial masyarakat desa tersebut

bersifat parokial atau menjadi kapital social yang paling dangkal, serta tidak mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi, guna mewujudkan desa yang bersemangat sosial dalam koteks demokrasi lokal (Fitriyani et al., 2018).

Investasi kapital ekonomi tentunya harus diimbangi dengan investasi kapital sosial yang kuat (Anggraeni & Sugianto, 2020). Kapital sosial yang tersebut terermin dari adanya nilai-nilai dan keyakinan yang muncul dalam mendukung program pembangunan ekonomi tersebut. Konsepsi mengenai pembangunan dan budaya dalam menyelaraskan hasil pembangunan telah terbukti di beberapa negara. Berbagai negara dalam kajian developmental state seperti China, Jepang dan Korea menggambarkan dimensi yang ekonomi yang kuat ditopang oleh ketersediaan modal kapital sosial yang mendukung (Johnson, 1999). Desa merupakan akumulasi dari kapital sosial yang paling relevan untuk dilihat di wajah desa. Nilai kultural dan nilai-nilai kearifan lokal tampak sebagai wajah desa yang kontras dengan perkotaan. Kapital sosial yang muncul di desa hendaknya terakumulasi juga dalam pengembangan bisnis di BUMDes.

Kapital sosial pedesaan menjadi suplemen dalam mengaktifkan rangsangan keterlibatan desa dalaam mendukung bisnis tersebut. invetasi sosial yang terwujud di

desa akan memberikan gamabaran terhadap kesuksesan dan profitnya entitas bisnis. Namun sayangnya kapital sosial yang dimiliki belum tereproduksi dengan cuku besar dan baik.

Beberapa bentuk hilangnya reproduksi kapital sosial ini terlihat dari beragam kondisi di ketiga desa dalam mengimplementasi skema bisnis BUMDes.

Pertama, reproduksi kapital sosial belum efektif, namun yang terlihat dari pembangunan adalah *networking* yang sudah berjalan dengan baik. Jaringan-jaringan kerjasama antar manusia terwujud dari infrastruktur dinamis dari kapital social yang memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi yang memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama (Putnam, 1995). Hal tersebut telah dilakukan oleh Pihak Mahadesa dan pemerintah yang memberdayakan masyarakat desa sebagai pegawai yang bekerja di BUMDes dan TDC, klaim atas ini pihak pemerintah memproyeksikan bahwa program TDC telah membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga desa. *Kedua*, adanya *trust* atau Kepercayaan yang merupakan harapan yang tumbuh dalam suatu masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Akan tetapi kapital sosial berupa “*trust*” dalam pembangunan BUMDes TDC berdasarkan pada skema

bisnis terbilang berhasil hanya pada satu arah saja. Di mana, masyarakat diberikan kepercayaan untuk berhutang atau diberikan pinjaman tanpa jaminan oleh pihak PT.Mahadesa dan Pemerintah desa. Namun di sisi lain, wawancara mendalam dengan komponen masyarakat di desa Dasan Baru Lombok Barat, kepercayaan berupa hutang tanpa jaminan tersebut justru membuat masyarakat takut untuk berhutang, karena penghasilan masyarakat yang tidak menentu dan pasti.

Ketiga, Skema bisnis BUMDes ini memberikan akses kemudahan bagi masyarakat desa, dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan jangka waktu 20-30 hari. Wawancara dengan direktur PT gerbang NTB Emas NTB, Gubernur NTB menyampaikan bahwa, Mahadesa adalah bentuk inovasi yang dikembangkan oleh PT.GNE untuk memberdayakan desa secara ekonomi, memudahkan masyarakat dalam mendapatkan berbagai jenis kebutuhan pokoknya tanpa harus keluar rumah. Pemesanan kebutuhan dapat dilakukan melalui sistem perangkat ponsel. Sedangkan BUMDes dalam hal ini dilibatkan sebagai ujung tombak, sekaligus sebagai fasilitator yang akan merekap dan memenuhi kebutuhan atau pesanan masyarakat.

Keempat, Kewajiban masing-masing pihak (PT.Mahadesa, BPD, dan

Pemdes) itu bersifat hirarkis dan terpisah, sehingga pengelolaan BUMDes cenderung tertutup. Pemerintah desa tidak melakukan upaya yang intensif dan pihak Mahadesa hanya memberatkan kepada SPV untuk melakukan penguatan kapital sosial serta masyarakat pun tidak begitu antusias. Tidak efektifnya peran pemerintah desa dan PT Mahadesa membuat kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes dan TDC. Hal ini dikuatkan dengan studi Rahayuningsih et al. (2019) yang menggambarkan tantangan BUMDes dalam sinergitas dinataranya aktor yang terlibat berupa: komunikasi, transparansi dan akuntabilitas, serta kapasitas manajerial.

Dalam pembentukan kapital sosial, timbulnya rasa percaya tidak dapat muncul dengan sendirinya, namun membutuhkan suatu proses membangun kepercayaan secara terus menerus (Priyambodo & Mahatmaharti, 2018). Kelima, Dalam pembangunan BUMDes ini ada sistem yang berjenjang atau tersentral, sehingga sistem tersebut membuat pihak Mahadesa dan pemdes tidak langsung turun ke masyarakat. Akibatnya, masyarakat menjadi kurang memahami program TDC. Jika melihat faktor indikator berhasilnya kapital sosial hanya terletak pada masing-masing individu saja, melainkan juga terletak pada kelompok, komunitas, maupun pada tingkat yang lebih besar lainnya (Fathy, 2019).

Permasalahan diatas, semakin kompleks dengan skema bisnis yang belum mengintegrasikan kapital sosial baik secara regulasi dan kelembagaan. Wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan pemerintah mengaskan bahwa Masing-masing pihak dan aktor tidak menjalankan kewajiban dalam pemberdayaan atau peningkatan modal sosial dan PT.Mahadesa hanya bertumpu pada nilai-nilai ekonomis, sebatas pada hubungan ekonomi saja. Selain itu juga tidak ada internalisasi norma-norma dalam pengelolaan BUMDes dalam tiga wilayah tersebut. Tidak terdapat organisasi sosial untuk mengawasi program BUMDes TDC di wilayah Lobar. Hubungan skema bisnis yang dijalankan tidak diimbangi dengan hubungan timbal balik yang baik diantara pemerintah, bisnis dan masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya pemasukkan barang dagangan dari warga desa/UMKM karena terkendala labeling dan kuota produk yang harus diproduksi dengan jumlah yang banyak karena peraturan dan regulasi dari PT. Mahadesa. Kurangnya keterbukaan mengenai skala ekonomi yang didapatkan, khususnya masyarakat.

Selain itu juga nihilitas peran negara juga tercermin dalam belum terintegrasinya kapital sosial sebagai modal pembangunan TDC di wilayah Lombok Barat. Peter loizos dalam (Field, 2010)

menekankan bahwa agenda pembangunan dipaksakan dan terpusat serta eksklusif dapat menjadi sebuah ancaman berakhir dan rusaknya kapital sosial yang ada inheren dengan kultur masyarakat. Selanjutnya agenda pemerintah dalam mendorong dan memainkan peran dalam mereproduksi kapital sosial terletak pada arah pembangunan yang ditopang oleh norma kebersamaan dan tidak parsial dalam pelibatan individu satu sama lain.

Dalam pendekatan kapital sosial dan pembangunan mempercayai bahwa kapital sosial dalam diwujudkan atau diciptakan oleh negara. Intensifikasi diskusi dengan pihak di pemerintah desa menekankan pada aspek dan strategi reproduksi kapital sosial masyarakat. Kapital sosial tidak hanya terwujud dengan sifat yang *endogenous* tetapi juga bisa diciptakan dengan kapasitas pemerintah. Menurut (Evans, 1996) Akumulasi kapital sosial dapat digerakkan oleh instrumen pemerintah melalui pelembagaan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pembentukan dan penguatan kapital sosial ini merupakan kebutuhan dalam mensuplai kemandegan invetasi ekonomi yang rentan terhadap kiris. Sehingga perlu ada kebijakan dan inovasi dalam merangsang terintegrasi dan reproduksi kapital sosial yang muncul. Dalam konteks ini setidaknya adalah beberapa kondisi kapital sosial yang tidak tereproduksi dikarenakan

absennya entitas negara dalam melakukan hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor baik secara kultur dan struktural.

Dari hasil observasi dan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan pihak pemerintah, Dalam konteks reproduksi kapital sosial di desa yang sedang mengimplementasikan TDC dibenturkan oleh ketidakmampuan negara/pemerintah daerah dalam melakukan hal tersebut dikarenakan ; pertama, BUMDes dan skema TDC tidak cukup kuat berjalan dikarenakan kerap mengalami benturan dengan masyarakat khususnya pengusahan yang merasa tersaingi dengan kehadiran BUMDes sehingga kapital sosial justru tereduksi dan terkesan masyarakat desa justru melawan kebijakan tersebut/tidak mendukung kebijakan tersebut dengan mereduksi BUMDes. Kedua, pemerintah tidak dapat mereproduksi kapital sosial dikarenakan kelembagaan kelompok masyarakat tidak dibina dan dipelihara oleh pemerintah. Ketiga, Kapital sosial tidak terekstratif kedalam program ini dikarenakan beberapa hal yang muncul dilapangan, nilai-subjektifitas dan terbelenggu oleh kepentingan ekonomi, sosial dan politik aparaturnya dalam pengelolaan BUMDes.

SIMPULAN

Pembangunan desa yang digagas melalui skema bisnis TDC BUMDes di wilayah Lombok Barat masih memiliki tantangan yang serius. Hilangnya kapital sosial sebagai salah satu bentuk modal pembangunan menjadi ancaman serius dari kegagalan cerita pembangunan yang terus berulang.

Dengan pendekatan kajian kritis studi ini menemukan bahwa, hilangnya kapital sosial itu bersumber dari beberapa hal diantaranya, pertama pembangunan desa masih inklusif sebagai agenda elite yang tercermin dari kewenangan dan pemaksaan agenda pembangunan TDC di wilayah Lombok Barat dengan segala bentuk intervensi pemerintah provinsi, selain itu juga tidak tereproduksinya kapital sosial dalam agenda pembangunan dan pengelolaan TDC desa tercermin dari regulasi dalam skema bisnis BUMDes yang lebih mengedepankan aspek struktural dibanding pendekatan kultural dalam mengatasi *dispute* bisnis di desa. Kondisi juga diperuncing dengan peran negara dan pemerintah yang belum maksimal mendorong terintegrasinya kapital sosial kedalam aspek penting penguatan modal pembangunan TDC desa di wilayah Lombok Barat.

REKOMENDASI

Studi terkait kapital sosial dalam pembangunan tentunya menarik untuk

dikaji lebih mendalam melalui pendekatan studi komparasi kasus dan lokus yang lebih besar. Keterbatasan waktu dan anggaran yang menyebabkan studi ini hanya mengelaborasi pada tiga desa di wilayah Lombok Barat dan belum dapat memberikan generalisasi yang kuat atas argument yang dibangun dalam studi ini. Sehingga studi selanjutnya diharapkan mampu untuk mengelaborasi kasus dan fenomena pembangunan pada wilayah dan agenda pembangunan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1).
- Adawiyah, R. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(3), 1–15.
- Amin, K. (2017). Elit dan Kekuasaan pada Masyarakat Desa (Studi Relasi Antara Pemerintah dan Masyarakat di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kep. Bangka Belitung. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 11(2), 167–187.
- Andari, R. N. (2021). Resensi: SDGs Desa, Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 24(1), 137. <https://doi.org/10.31845/jwk.v24i1.71>
- Anggraeni, H., & Sugianto, T. (2020). Kapital Sosial Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Terpencil. *Jurkami : Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2(2), 61–68. <https://doi.org/10.31932/jpe.v2i2.617>
- Chambers, R. (1987). Pembangunan Masyarakat Desa , Mulai Dari Belakang. In *LP3ES*.
- Diah, M. P. (2020). *Journal of Research*, 2(2), 165–173. <https://doi.org/10.33005/paj.v2i2.45>
- Evans, P. (1996). Government action, social capital and development: Reviewing the evidence on synergy. *World Development*, 24(6), 1119–1132. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(96\)00021-6](https://doi.org/10.1016/0305-750X(96)00021-6)
- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463>
- Fitriyani, Y., Nurmalina, R., Pebriana, R., & Suasri, E. (2018). Menggerakkan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEDITEG*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.34128/mediteg.v3i1.35>
- Fukuyama, F. (2002). Social Capital and Development: The Coming Agenda. *SAIS Review*. <https://doi.org/10.1353/sais.2002.0009>
- Gutama, P. P. B., & Widiyahseno, B. (2020). Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa. *REFORMASI*, 10(1), 70–80. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.183>

- Hall, D. (2004). Smallholders and the spread of capitalism in rural Southeast Asia. *Asia Pacific Viewpoint*, 45(3), 401–414.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2004.00248.x>
- Haryanto. (2016). Masa Depan Politik Desentralisasi di Indonesia: Sebuah Studi Awal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 111–124.
- Hisyam, D. (2015). Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Pembangunan. *Efisiensi - Kajian Ilmu Administrasi*, 4(1).
<https://doi.org/10.21831/efisiensi.v4i1.3803>
- Johnson, C. (1999). The Developmental State: Odyssey of a Concept. In: Woo-Cumings, M (Ed), The developmental state . *Cornell University Press, New York*.
- Kafabih, A. (2018). Analisis Peran Modal Sosial Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) terhadap Pengentasan Kemiskinan. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 3(1), 51–70.
<https://doi.org/10.15642/oje.2018.3.1.51-70>
- Kesuma, P. T. A., & Saputri, L. L. (2020). Modal Sosial Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Usaha Jasa Pengelolaan Lingkungan. *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan*, 3(1), 14–23.
<https://doi.org/10.24905/igj.v3i1.1489>
- Kimbal, M. (2018). Partisipasi Politik Dalam Proses Pembangunan Desa Di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. *Sosiohumaniora*, 20(3), 282–287.
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i3.19018>
- Lestari, I. (2016). Kerja Sama Pembangunan Korea Selatan di Vietnam dalam Pengembangan Area Pedesaan melalui Model Saemaul Undong. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 18(2), 177–201.
<https://doi.org/10.7454/global.v18i2.303>
- Mohapatra, B. N., & Evans, P. (1998). State-Society Synergy: Government and Social Capital in Development. *Contemporary Sociology*.
<https://doi.org/10.2307/2655207>
- Muhammad Saleh. (2021). Dinamika Lembaga Demokrasi Desa Di Indonesia (Sebuah Kajian Pustaka). *Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 9(2), 71–82.
<https://doi.org/10.53952/jir.v9i2.334>
- Nain, U. (2019). Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris. In F. Muhammad (Ed.), *Garis Khatulistiwa*. Graha Khatulistiwa.
- Nasution, R. D. (2016). Pengaruh Kesenjangan Digital Terhadap Pembangunan Pedesaan (Rural Development). *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 20(1 Juni), 31–44.
- Peet, R., & Hartwick, E. (2015). Introduction: Growth versus Development. In *Theories of Development: Contentions, Arguments, Alternatives*. Guilford Press.
- Pratikno. (2020). Pengelolaan Hubungan Antar Pusat dan Daerah. *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*.
- Prijambodo, R. F. N., & Mahatmaharti, A. K. (2018). Membangun Modal Sosial Pada Masyarakat Di Era Globalisasi. *Alpen: Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(1), 10–16.

<https://doi.org/10.24929/alpen.v1i1.4>

- Putnam, R. D. (1995). Bowling Alone: America's Declining Social Capital. *Journal of Democracy*, 6(1), 65–78. <https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002>
- Rahayuningsih, Y., Budiarto, S., & Isminingsih, S. (2019). Peran Bumdes Dalam Penguatan Ekonomi Desa Sukaratu Kabupaten Serang, Banten. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 3(2). <https://doi.org/10.37950/jkpd.v3i2.63>
- Riwu Kaho, Josef. (1997). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. *Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraanya*, 2.
- Saputro, A. (2020). Urban Crisis: Produk Kegagalan Urbanisasi di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(1), 173. <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.2000>
- Sugianto, S., & Permadhy, Y. T. (2020). Perencanaan Pembangunan Inklusif Melalui Peran Partisipatif Pemerintah Daerah. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 7(1), 87. <https://doi.org/10.24252/ecc.v7i1.13565>
- Tsai, W., & Ghoshal, S. (1998). Social Capital and Value Creation: The Role of Intrafirm Networks. *Academy of Management Journal*, 41(4), 464–476. <https://doi.org/10.5465/257085>
- Waris, I. (2012). Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1), 38–47.